



BIAS CARA PANDANG

DALAM ISU KEKERABATAN BAGI

KEPALA DAERAH PEREMPUAN

Masih ingat lembar fakta sebelumnya?

Di unggahan 22 Juni 2022 kemarin, Cakra Wikara Indonesia (CWI) sudah membahas tentang **bias tafsir agama sebagai tantangan kepala daerah perempuan**.



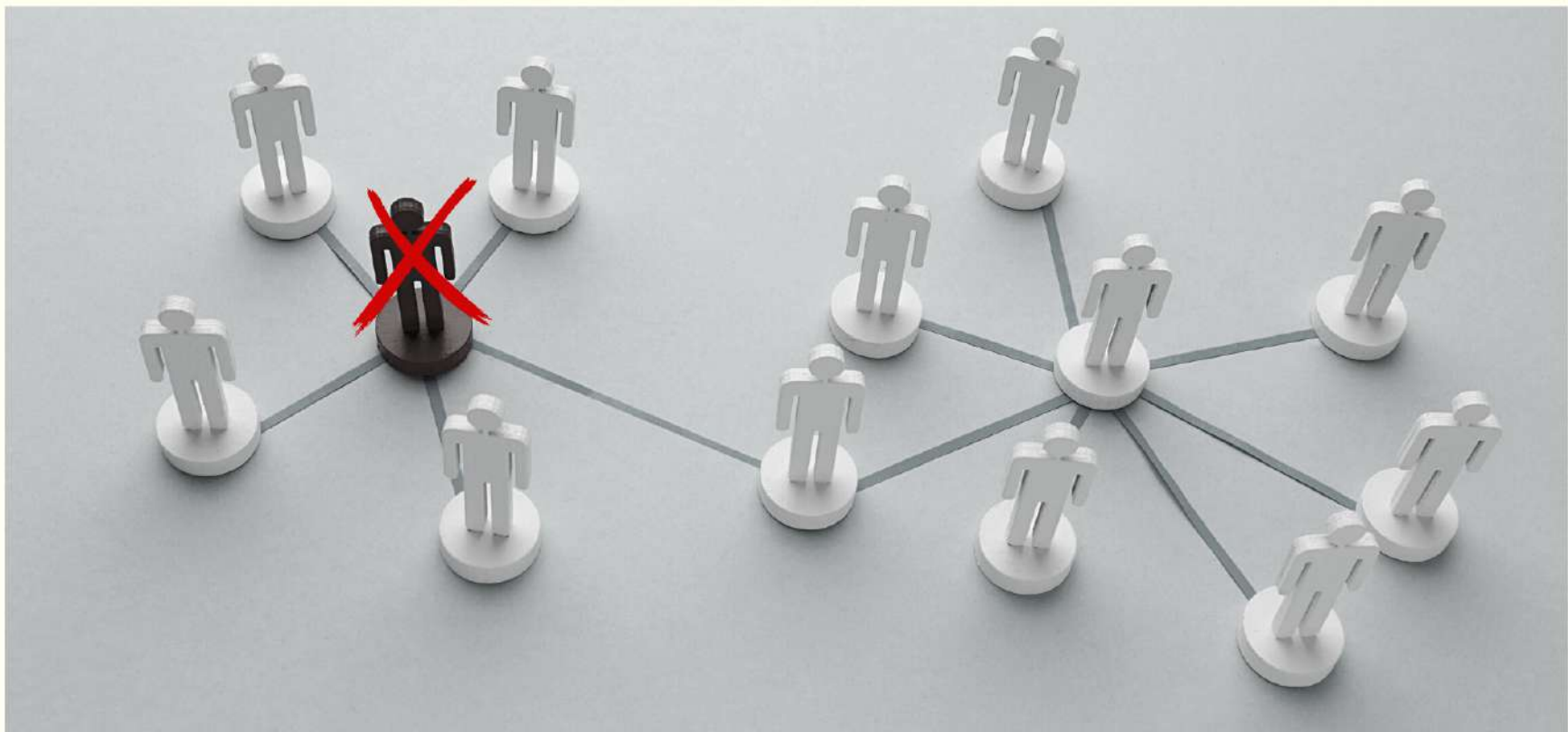
22 Juni 2022

Nah, selain bias tafsir agama, ternyata **ada bias lain yang menjadi tantangan kepala daerah perempuan**, loh. Hmm. . . bias apa, ya?

B I A S

Latar belakang kekerabatan

Jadi, selain bias tafsir agama, kepala daerah perempuan juga menghadapi **bias cara pandang** khususnya untuk mereka yang **berlatar belakang kekerabatan**. Artinya, perempuan yang maju sebagai kepala daerah cenderung **dikaitkan dengan relasi mereka kepada suami atau keluarga yang sebelumnya pernah menjadi kepala daerah**. *Yap*, akibatnya pengalaman dan kemampuan kepala daerah perempuan diabaikan begitu saja. *Huhu...*





Dari riset yang dilakukan oleh CWI, ada, *loh*, kepala daerah perempuan dengan latar belakang kekerabatan yang **memiliki pengalaman kepemimpinan dan berpolitik yang bahkan lebih panjang** daripada suami atau keluarganya. Selain itu, mereka juga memiliki **gaya kepemimpinan yang beda** dari suami atau keluarganya tersebut.

Siapa saja mereka?

Dewanti Rumpoko



Pertama, ada **Dewanti Rumpoko!** Beliau adalah **Wali Kota Batu periode 2017–2022.** Sebelum Dewanti, Wali Kota Batu adalah suaminya yaitu **Eddy Rumpoko** yang menjabat dari **2007–2017.** Yap, karena hal tersebut Dewanti pernah menjadi sorotan yang dikaitkan dengan isu kekerabatan untuk mendiskreditkan kemampuannya.

Padahal jika ditelusuri, **Dewanti justru memiliki pengalaman politik yang lebih panjang dibanding suaminya.** Sejak 1990an, Dewanti sudah memulai karier politik sebagai kader partai Golkar. Sementara itu, suaminya baru bergabung di partai pada 2007 saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Batu dari PDIP. Di 1997, Dewanti juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang.

Anne Ratna Mustika

Selanjutnya, *meet Anne Ratna Mustika* yang merupakan **Bupati Purwakarta periode 2018–2023**. Mirip seperti yang dialami Dewanti, **suami Anne adalah Bupati Purwakarta periode 2008–2018** yang kemudian membuatnya perlu menghadapi bias cara pandang terkait isu kekerabatan. Padahal, **Anne sudah memiliki pengalaman mengamati kegiatan politik jauh sebelum ia menikah, loh.**



Anne sendiri **berasal dari keluarga besar politisi** yang membuatnya terbiasa mengamati proses pemerintahan daerah. Kemudian, sejak 1997–2003, Anne juga dekat dengan kerabat yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Belum lagi, sejak 2005–2018 Anne juga menjadi ketua organisasi sayap partai Golkar.

Gaya kepemimpinan



B E R B E D A

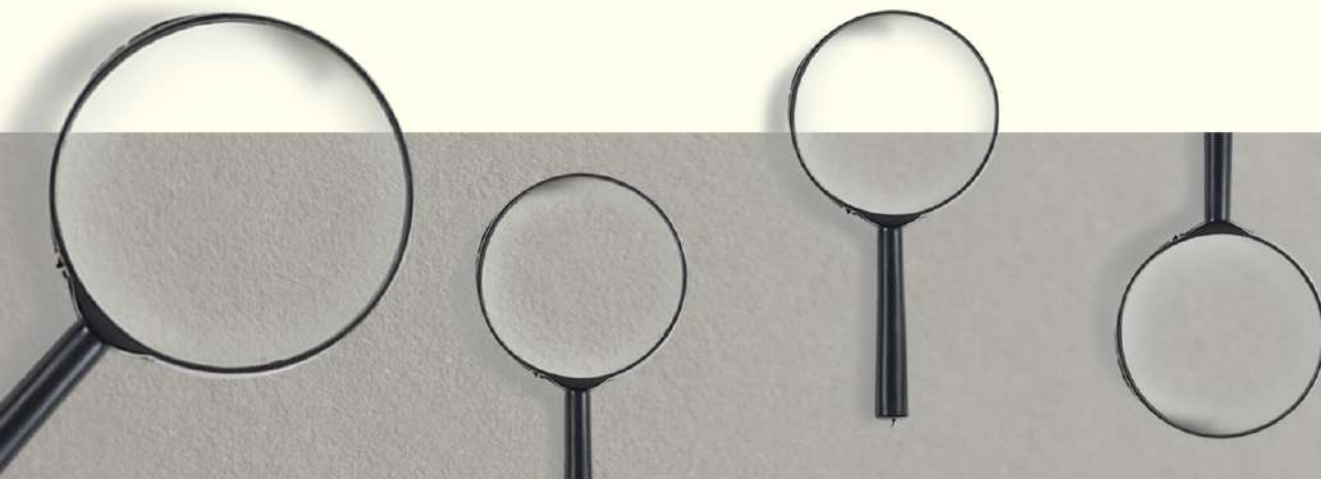


Selain pengalaman, Dewanti dan Anne juga memiliki gaya kepemimpinan yang beda dari suaminya. Dari temuan CWI, Dewanti memilih pendekatan yang beda dari suaminya dalam implementasi program, yaitu dengan mengikuti aturan dan mendasarkan pada hasil kajian. Sementara itu, Anne memiliki gaya kepemimpinan yang akomodatif di mana hal itu ditunjukkan dengan keberhasilannya merangkul kelompok agama yang berseberangan dengan suaminya. Dalam hal ini, Anne menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk pembangunan Purwakarta.

Bukan masalah khas perempuan

Nah, dari pengalaman serta gaya kepemimpinan Dewanti dan Anne, *kebayang, dong*, kalau kepala daerah perempuan yang dikaitkan dengan isu kekerabatan **tidak serta-merta membuat mereka tidak mampu memimpin dengan baik.**

Namun, ada hal yang memang perlu dikritisi, *nih*. Sejauh ini, isu kekerabatan sering dianggap sebagai masalah khas perempuan. Padahal, isu kekerabatan juga ada yang melibatkan laki-laki, *kok*. CWI berpandangan bahwa **pertalian kekerabatan lebih tepat disoroti sebagai buruknya proses rekrutmen politik dan mengindikasikan adanya perpanjangan tangan kekuasaan lama, bukan sebagai masalah khas politisi perempuan.**



Untuk membaca secara utuh tentang kepala daerah perempuan, kamu bisa baca laporan riset berjudul “Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan: Tarik Ulur Relasi dan Identitas” yang diterbitkan Cakra Wikara Indonesia (2021).

Laporan Riset
Kepemimpinan Politik
Delapan Kepala Daerah Perempuan:
Tarik Ulur Relasi dan Identitas

Penulis :
Mia Novitasari
Roni
Dirga Ardiansa

Cakra Wikara Indonesia
2021



Kingdom of the Netherlands

Unduh di:

bit.ly/laporanrisetcwikepemimpinanpolitik